

MASALAH PELAKSANAAN KURIKULUM PPKN 2013 DAN UPAYA MENGATASINYA (Penelitian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Cianjur)

oleh Yahya Mulyadi
yahyamulyadi@unsur.ac.id

Universitas Suryakencana

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Cianjur. Penelitian menggunakan Pendekatan Naturalistik-Kualitatif dan metodenya memakai Metode Deskriptif-Fenomenologis. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 belum sepenuhnya berjalan sesuai tuntutan implementasinya. Guru PPKn menghadapi masalah terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kurikulum dan pengelolaan pembelajaran. Ada upaya mengatasi masalah tersebut, baik upaya sendiri guru PPKn maupun bersama sejawatnya. Namun, tampak upaya itu belum optimal, begitu pula dalam dukungan pihak-pihak berkepentingan.

Kata kunci: *PPKn, Sosialisasi Kurikulum, Pengelolaan Pembelajaran.*

PENDAHULUAN

Dalam Kurikulum sekolah menengah Tahun 2013 yang saat ini berlaku, antara lain terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan pengganti dari mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006.

Secara teoritik dalam Kurikulum sebagai ilmu, mata pelajaran adalah kurikulum. Dalam hal ini Sumantri (1988:2) menyatakan bahwa kurikulum dalam arti sempit merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam studinya. Di samping kurikulum dalam arti sempit, ada pula kurikulum dalam arti luas dan sangat luas. Dalam arti luas, selain mata pelajaran kurikulum meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Adapun dalam arti yang sangat luas kurikulum adalah kegiatan apapun yang harus ditempuh oleh siswa dalam studinya

Kurikulum PPKn sekolah menengah Tahun 2013 ada yang berlaku nasional, dan ada pula yang berlaku lokal. Kurikulum PPKn itu yang berlaku nasional diterapkan di sekolah menengah manapun yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan kurikulum PPKn lokal hanya berlaku di sekolah tertentu saja. Kurikulum PPKn nasional hasil pengembangan tim Depdikbud, dan kurikulum PPKn lokal hasil pengembangan masing-masing guru PPKn di sekolah yang berlaku untuk kelasnya masing-masing

Dalam konteks kurikulum lokal, guru PPKn adalah pengembang kurikulum. Guru PPKn sebagai pengembang kurikulum menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam hal ini guru PPKn otonom, tetapi meskipun demikian harus mengikuti rambu-rambu yang berlaku yakni harus sesuai dengan panduan penyusunan RPP.

Kurikulum PPKn yang berlaku nasional memiliki tujuan dan program. Inilah yang harus dipedomani guru PPKn dalam menyusun RPP. Tujuan mata pelajaran PPKn, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator adalah jenis-jenis tujuan PPKn, dan dengan berdasarkan kepadanya guru PPKn mengembangkan tujuan pembelajaran PPKn untuk kelasnya. Adapun program PPKn yang berlaku nasional selain panduan penyusunan RPP seperti di atas telah dikemukakan, ada pula yang berupa silabus dan buku ajar.

Panduan yang berlaku untuk SMK, sama dengan yang berlaku untuk sekolah menengah yang lain yaitu sama dengan yang berlaku bagi SMA dan Aliyah. Beberapa hal terkait dengan panduan itu menuntun guru PPKn untuk:

1. mengembangkan tujuan pembelajaran PPKn dengan fokus utama pada sikap kewarganegaraan;
2. menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai sumber utama materi pelajaran PPKn;
3. menggunakan strategi pembelajaran berpola pendekatan saintifik berdasarkan prinsip pembelajaran siswa aktif;
4. menerapkan penilaian berpola pendekatan otentik.

Silabus Kurikulum PPKn 2013 berbeda dengan ketika berdasarkan Kurikulum 2006, yakni bukan lagi tugas guru untuk menyusunnya. Tetapi, dalam Kurikulum PPKn 2013 silabus sudah dibuat oleh Depdikbud untuk dipedomani oleh guru PPKn dalam menyusun RPP.

Demikian pula buku ajar ada paket untuk guru dan siswa. Guru dan siswa dituntut memanfaatkan buku tersebut dalam pembelajaran, walaupun guru masih berkesempatan terbuka memanfaatkan juga buku, sumber lain sebagai referensi untuk memperkaya kemampuan siswa.

Guru PPKn melaksanakan pembelajaran di kelasnya berdasarkan RPP yang disusunnya. Pembelajaran adalah proses yang berlangsung agar siswa dapat menguasai materi pelajaran, antara lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh guru. Dimaklumi bahwa dalam Kurikulum 2013 ketika guru menyusun RPP dirumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan pada indikator, kompetensi dasar (KD), dan kompetensi inti (KI).

Proses pembelajaran sebagai paduan aktivitas guru dengan siswa, guru melakukan kegiatan mengajar dan siswa melaksanakan kegiatan belajar menempuh tiga tahap utama, yaitu menempuh tahap awal; tahap inti; dan tahap akhir. Tahap awal adalah tahap pembukaan di mana guru memperkenalkan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa. Tahap inti adalah tahap di mana siswa mempelajari materi pelajaran sesuai strategi pembelajaran yang diterapkan, melaksanakan model pembelajaran yang digunakan, dan juga menggunakan metode, media pembelajaran tertentu yang telah dipilih untuk dipakai. Tahap akhir atau tahap penutup lazimnya menyimpulkan materi pelajaran yang dikaji, di samping menyampaikan tindak lanjut antara lain tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Dalam proses pembelajaran dimungkinkan pula melakukan evaluasi baik itu penilaian awal maupun penilaian akhir. Namun, secara khusus evaluasi PPKn diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

Paparan di atas memperlihatkan Kurikulum PPKn 2013, baik sebagai rencana, sebagai proses kegiatan, maupun sebagai hasil belajar. Hasan (1988:28) menyebut hal tersebut sebagai dimensi kurikulum. Peneliti melihat berbagai dimensi kurikulum itu, secara teoritis merupakan manajemen kurikulum, karena kurikulum sebagai rencana merupakan hasil perencanaan, kurikulum sebagai proses merupakan pengimplementasian kurikulum sebagai rencana, dan kurikulum sebagai hasil belajar diketahui setelah evaluasi. Dalam manajemen dikenal fungsi manajemen yang terdiri dari planing, implementing, dan evaluating (Mulyasana, 2011:189). Selain itu, dikenal teori fungsi manajemen dari Terry (2016:9-10,17) yang mengemukakan empat fungsi fundamental manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), gerak aksi (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Diharapkan pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dapat berlangsung dengan baik-benar. Maksudnya, PPKn berjalan sesuai dengan tuntutan, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Kenyataan, dari studi pendahuluan peneliti berdasarkan wawancara dengan beberapa guru sekolah menengah atas Cianjur, mereka mengalami masalah dalam pelaksanaan kurikulum PPKn 2013. Masalah yang dihadapi antara lain guru belum mendapat pendidikan dan latihan

(diklat) atau penataran mengenai Kurikulum PPKn 2013, dalam penerapan penilaian otentik ada guru yang tidak paham saat mengajar sekaligus juga melakukan penilaian terhadap siswa.

Dari tulisan tentang masalah utama Kurikulum PPKn 2013 dalam <https://new.okezone.com> (2014) antara lain diketahui masalah sebagai berikut.

1. Tema di seluruh kelas seragam, sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasikan bertentangan dengan UU Sisdiknas.
2. KI dan KD disusun tidak seksama sehingga menyebabkan ketidak selarasan.
3. Kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan sehingga mengganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan dan beban administrasi berlebihan bagi para guru.
4. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya kepada siswa.
5. Ketidak siapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menyebabkan beban tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan luar sekolah.

Paparan Mulyasana (2014:4) memperlihatkan masalah praktik pendidikan di lapangan telah ke luar dari tujuan pendidikan nasional, fondasi dan pemikiran pembangunan nasional telah dikuasai konsep/teori-teori ekonomi dan politik dengan mengabaikan konsep keagamaan dan teori-teori pendidikan, ada “pengkondisian” bahwa puncak prestasi pendidikan tidak ubahnya sebagai alat produksi ijazah dibalik ijazah tidak otomatis melekat keimanan, akhlak mulia, karakter, kehormatan, dan jati diri secara utuh.

Memperhatikan uraian di atas, peneliti bermaksud meneliti masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya. Penelitian dibatasi hanya di SMK Negeri Cianjur yang fokusnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut.

1. Masalah dalam sosialisasi Kurikulum PPKn 2013 di SMK Negeri Cianjur.
2. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Kurikulum PPKn 2013 di SMK Negeri Cianjur baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah dalam sosialisasi dan pengelolaan Kurikulum PPKn di SMK Negeri Cianjur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya. Penelaahan dilakukan terhadap masalah dalam sosialisasi, pengelolaan baik dalam perencanaan; pelaksanaan; maupun evaluasi, serta upaya mengatasi masalah itu secara natural tanpa rekayasa dalam situasi lapangan tempat penelitian.

Oleh karena penelitian memfokuskan terhadap masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya, yang berarti penelitian mengutamakan pada proses aktivitas, dan penelitian dilakukan secara natural tanpa rekayasa, maka sesuai dengan pendapat Creswell (1994:145) dan Nasution (1996:18) pendekatan penelitian yang dipakai adalah Pendekatan Naturalistik-Kualitatif. Metode penelitian mempergunakan Metode Deskriptif-Fenomenologis, pertimbangan penggunaannya bahwa masalah pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 dan upaya mengatasinya adalah yang terjadi saat ini, di samping berfokus pada penafsiran untuk mencari esensi maknanya.

Data dicari dari sumber-sumber informasi di lokasi penelitian yang ditetapkan secara *purposive*. Teknik penelitian yang digunakan beragam terdiri atas observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang prosesnya *snowball* sampai data yang terkumpul mengalami kejenuhan. Prosedur penelitian menempuh tahap orientasi, eksplorasi, dan member cek. Data penelitian diolah sejak mulai data dikumpulkan dan berakhir ketika kesimpulan final dihasilkan. Dalam pengolahan dilakukan reduksi data, display data, dan verifikasi kesimpulan yang dalam prosesnya menempuh triangulasi, audit trail, dan member cek sehingga hasil penelitian memenuhi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

PEMBAHASAN

Penelitian ini memperoleh hasil temuan berupa masalah dalam sosialisasi kurikulum PPKn, pengelolaannya, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah. Terhadap temuan tersebut dilakukan pembahasan. Hasil temuan penelitian sebagai berikut.

1. Masalah dalam sosialisasi Kurikulum yaitu tidak semua guru memperoleh diklat Kurikulum 2013, guru ada yang tidak pernah ditugaskan mengikuti Seminar dan Penataran Kurikulum 2013, guru mengharapkan pendampingan dari perguruan tinggi tetapi tidak pernah mendapatkan.

2. Masalah dalam pengelolaan pembelajaran yaitu kadang-kadang siswa berbuat indisipliner, penggunaan media pembelajaran kadang-kadang terhambat oleh ketidak layakannya untuk digunakan serta karena guru mengabaikan penggunaannya, pembelajaran dominan menerapkan pendekatan ekspositorik, penilaian terhadap setiap siswa secara lisan dalam tatap muka pembelajaran tidak mudah dilaksanakan, belum konsisten dalam pembiasaan karakter.
3. Guru PPKn telah berusaha mengatasi masalah yang dihadapi baik melalui upaya sendiri maupun bersama sejawat, seperti menegur dan atau menasihati siswa indisipliner, menggunakan laptop dan infokus yang dibeli pribadi, dan penilaian terhadap siswa ketika pembelajaran dilakukan bertahap. Namun demikian, tampaknya upaya itu belum optimal, begitu pula kaitannya dengan dukungan pihak-pihak berkepentingan.

Demikian masalah dalam pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 menurut temuan penelitian ini terkait dengan sosialisasi kurikulum dan pengelolaan pembelajaran. Sosialisasi Kurikulum 2013 telah dilakukan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan berhasil. Pengelolaan pembelajaran di sekolah-sekolah sebagai pelaksanaannya sejak awal diberlakukan sampai dengan sekarang terus berlangsung.

Diketahui bahwa Kurikulum 2013 merupakan perubahan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam KTSP 2006, dalam Kurikulum 2013 diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan tersebut dilakukan melalui Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah Menengah.

Di atas telah disinggung bahwa terkait dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 termasuk di dalamnya Kurikulum PPKn 2013, telah dilakukan sosialisasi agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan berhasil. Memang, sosialisasi adalah pembelajaran yang berhubungan dengan nilai dan norma yang berlaku guna menjalankan dan menciptakan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma itu (Setiana, 2014). Oleh sebab itu, sosialisasi Kurikulum 2013 dilaksanakan sebagai pembelajaran guna menciptakan sikap dan perilaku sesuai dengan norma dan nilai yang dituntut Kurikulum tersebut, dan tentu saja agar dapat juga mengetahui dan memahami segala seluk beluknya. Pengetahuan, sikap, dan perbuatan para pelaksana Kurikulum 2013 yang sesuai tuntutan Kurikulum tersebut dibutuhkan agar berjalan lancar dan berhasil. Itulah sebabnya dalam pemberlakuan suatu Kurikulum antara lain dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 menempuh sosialisasi. Sosialisasi antara lain dilakukan terhadap guru PPKn.

Guru PPKn adalah pengampu Mata Pelajaran PPKn, dengan kata lain sebagai pengelola Mata Pelajaran PPKn. Sumantri (1998:2) antara lain melihat mata pelajaran adalah kurikulum. Kurikulum dalam teori dimensinya dari Hasan (1998:28) tersusun dalam kurikulum sebagai ide atau konsepsi, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai kegiatan (proses), dan kurikulum sebagai hasil belajar.

Pengelolaan mata pelajaran adalah pengelolaan kurikulum, demikian antara lain terkait dengan mata pelajaran PPKn sehingga mengemuka pengelolaan kurikulum PPKn. Tilaar (1999:xii) melihat pengelolaan disebut pula manajemen. Dalam manajemen ada urusan perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Akdon, 2011). Tiga urusan manajemen itu dalam Mulyasana (2011) dikemukakan sebagai *formulasi, implementasi, evaluasi*.

Bersandar pada para ahli di atas, terlihat dalam pengelolaan mata pelajaran atau kurikulum PPKn menyangkut urusan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tentu saja ketiga urusan itu tidak lepas dari urusan ide-idenya terutama ide guru.

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum PPKn, harapannya dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan Kurikulum tersebut, namun kenyataannya berdasarkan temuan penelitian ini seperti di atas telah dikemukakan mengalami masalah. Ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah, baik upaya sendiri guru PPKn maupun upaya bersama dengan sejawatnya. Terungkap melalui penelitian ketika siswa insisipliner guru PPKn mengingatkan dan atau menasihati, menggunakan laptop dan infokus yang dibeli pribadi, dan penilaian terhadap siswa ketika pembelajaran dilakukan bertahap. Diungkapkan kembali masalah yang ditemukan terjadi baik dalam sosialisasinya terhadap guru maupun dalam pengelolaannya oleh mereka. Diketahui penelitian lain pun terkait dengan pelaksanaan kurikulum menemukan permasalahan, seperti penelitian Rahmawati dan Cholisin (2012), Chotimah (2013), dan Suryadi dkk. (2010). Penelitian Rahmawati dan kawannya memperlihatkan manajemen PPKn yang baik-benar masih perlu peningkatan karena dalam perencanaan hanya sebagian kecil berkatagori tinggi (46, 5%), dalam proses pembelajaran sebagian besar berkatagori sedang (58, 1%), dan dalam penilaian sebagian besar berkatagori sedang (81, 4%). Penelitian Chatimah menunjukkan fakta bahwa dalam perencanaan PPKn tujuan yang ditetapkan hanya untuk mencapai tingkat kognitif, media pelajaran yang digunakan untuk merangsang domain kognitif saja, metode pembelajaran lebih suka menggunakan ceramah dikombinasikan dengan tanya jawab. Penelitian Suryadi dan kawan-kawan menemukan proses pembelajaran menyuguhkan pengetahuan yang dihapal dengan muatan teoritis padat kurang

menumbuhkan potensi dan kreativitas, prestasi belajar siswa rendah karena belajar tidak optimal disebabkan pembelajaran belum mampu menarik, nyaman, menyenangkan bagi mereka.

Penelitian ini dengan penelitian lain yang baru saja dikemukakan memiliki jarak waktu tidak kurang dari 6 tahun, penelitian lain telah lama selesai yang terakhir tahun 2013 sedangkan penelitian ini selesai pengumpulan datanya tahun 2019. Namun demikian ternyata, yang ditemukan penelitian lain itu ada kesamaannya dengan penelitian ini. Hal ini berarti dalam kesamaan tersebut belum ada perubahan. Setelah 6 tahun lewat masih bermasalah baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya, maupun evaluasi sebagaimana terungkap dalam fakta penelitian ini dan penelitian lain di atas.

Penelitian ini menemukan pula masalah dalam sosialisasi kurikulum PPKn dan belum konsisten dalam pembiasaan karakter siswa. Belum konsisten dalam pembiasaan karakter dapat menjadi penyebab siswa berbuat indisipliner seperti yang ditemukan melalui penelitian ini. Padahal dimaklumi bahwa dalam Kurikulum 2013 pembinaan karakter siswa tuntutan pula dari kurikulum itu, yang bukan hanya terkait dengan PPKn tetapi juga dengan semua mata pelajaran lain sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP dan Permendibud Nomor 20 Tahun 2018 tentang PPK.

Memperhatikan pembahasan di atas, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan sosialisasi kurikulum terutama PPKn kepada guru, mengoptimalkan dukungan semua pihak berkepentingan terhadap guru PPKn dalam melaksanakan kurikulum. Dalam rangka sosialisasi perlu melibatkan perguruan tinggi yang memiliki Jurusan/Prodi PPKn. Hal ini mengemuka berdasarkan harapan guru PPKn agar perguruan tinggi itu berinisiatif memberikan pendampingan kepada mereka. Dukungan terhadap guru PPKn dalam menjalankan tugasnya akan membanggakan. Potensi dukungan terlihat ada, jika nyata maka keberhasilan PPKn akan mengemuka. Pihak lain di sekolah, pemerintah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan siapa pun seharusnya mendukung. Selama ini tampak dukungan itu tidak memadai untuk keberhasilan PPKn. Selain karena paradok kehidupan yang tidak menjadi keteladanan dalam rangka mencapai keberhasilan PPKn sebagai pendidikan kebangsaan dan pendidikan karakter, juga pengawasan terhadap guru belum optimal padahal dipandang penting dan seharusnya dikemas dalam komunikasi yang nyaman, menarik, menyenangkan sehingga guru tidak merasa tertekan bahkan termotivasi untuk bekerja sesuai tuntutan. Fokus tuntutan demi keberhasilan guru kepada optimalisasi kemampuan komunikasi belajar-mengajar, bukan kepada administrasi yang menurut guru dalam jumlahnya saja saat ini banyak sekali,

sehingga membutuhkan pula waktu yang banyak untuk mengerjakannya daripada melaksanakan pembelajaran, yang untuk PPKn hanya 2 x 45 menit per minggu. Administrasi guru saat ini setidaknya ada 20 jenis yaitu program tahunan, program semesteran, analisis KI dan KD, KKM, RPP, dll (Wildan, 2014).

Dalam rangka membangun kemampuan komunikasi pembelajaran, guru harus menguasai tujuan dan materi pelajaran, terampil merancang strategi kegiatan belajar-mengajar dan evaluasi serta mahir melaksanakannya. Ini yang seharusnya menjadi fokus dalam pembinaan guru bukan administrasi guru.

KESIMPULAN

Kesimpulan umum bahwa pelaksanaan Kurikulum PPKn 2013 belum sepenuhnya berjalan sesuai tuntutan implementasinya. Guru PPKn menghadapi masalah terkait dengan pelaksanaan sosialisasi kurikulum dan pengelolaan pembelajaran.

Kesimpulan khusus di bawah ini mengungkapkan hal-hal yang menjadi masalah dalam sosialisasi dan pengelolaan itu, yaitu:

- a. Dalam sosialisasi kurikulum tidak semua guru PPKn memperoleh pendidikan dan latihan (diklat), guru ada yang belum pernah mengikuti seminar dan penataran Kurikulum PPKn 2013, selain itu para guru menginginkan ada pendampingan dari perguruan tinggi Jurusan/Program Studi PPKn tetapi tidak pernah mendapatkan;
- b. Dalam pengelolaan pembelajaran kadang-kadang mengalami gangguan dari siswa indiscipliner, hambatan dalam penggunaan media pembelajaran antara lain karena ketidak layakannya dan guru mengabaikannya, pembelajaran yang menerapkan pendekatan ekspositorik disukai guru, penilaian terhadap siswa ketika kegiatan belajar-mengajar tidak mudah, kurang konsisten dalam pembinaan karakter.
- c. Ada upaya yang dilakukan oleh guru PPKn untuk mengatasi masalah yang dihadapi baik melalui upaya sendiri maupun bersama sejawat, seperti menegur dan atau menasihati siswa indiscipliner, menggunakan laptop dan infokus yang dibeli pribadi, dan penilaian terhadap siswa ketika pembelajaran dilakukan bertahap. Namun demikian, tampaknya upaya itu belum optimal, begitu pula kaitannya dengan dukungan pihak-pihak berkepentingan.

Saran-saran

Memperhatikan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut.

- a. Perguruan tinggi Jurusan/Program Studi PPKn dalam pengabdian hendaknya memberikan pendampingan pelaksanaan Kurikulum kepada guru. Perlu ada

kesepakatan dengan sekolah antara lain dengan guru PPKn tentang hal tersebut.

- b. Perlu konsistensi dalam membina karakter siswa. Konsistensi itu penting agar nilai-nilai karakter tertanam menjadi kebiasaan. Ketika konsistensi dalam pembinaan tidak tercipta sungguh menghawatirkan, mengingat dapat membuat perbuatan indisciplinerlah yang justru menjadi kebiasaan karena biasa dibiarkan.
- c. Pihak-pihak lain di luar guru PPKn, baik pihak lain di sekolah maupun yang di luar sekolah, hendaknya memberi dukungan memadai terhadap upaya guru membina siswa antara lain dalam pembinaan karakter.
- d. Perlu ada perbaikan dalam upaya pengawasan terhadap guru, yaitu harus lebih memperhatikan kemampuan mengajar dari pada administrasi guru. Bahkan beban administrasi itu pun hendaknya ditinjau kembali agar tidak banyak seperti sekarang, yang oleh guru dirasakan memberatkan, menyita waktu banyak, sehingga perhatian terhadap pembinaan belajar siswa tidak memadai karena waktunya banyak tersita untuk urusan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, 2011. *Strategic Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Chatimah, Umi. 2013. *Depelopment of Lesson Plan that Integrate Pancasila Values and Its Influences Toward Student's Learning Motivation*. Mohammad-momandha.blogspot.com
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, S. Hamid. 1988. *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.
- <https://news.okezone.com> 2014. *Masalah Utama Kurikulum 2013*.
- M, Wildan. 2014. *Administrasi Guru*. Gifhtub.Com.
- Mulyasana, Dedi. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsit
- Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah Menengah.
- Rahmawati, Rini dan Chalisin. 2012. *Implementasi PPKn sebagai Pendidikan Politik di SMAN se Kabupaten Bantul*. Journal. Student.uny.ac.id.
- Sudjana, Nana dan R. Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

- Sumantri, Mulyani. 1988. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta. Depdikbud.
- Suryadi, Ace. dkk. 2010. *Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan: Studi Relevansi Pendidikan*. UPI dengan Balitbang Kemendiknas.
- Sutiana. 2014. *Kompasiana Beyond Blogging*.
- Tilaar, HAR. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya.